



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II RIAU

JL. DR. SOETOMO NO. 88
RINTIS KEC. LIMA PULUH,
PEKANBARU, 28141

TELP. (0761)8441397
FAX . -
HOMEPAGE.

EMAIL : bptdkelas2riau@gmail.com
: BPTD KELAS II RIAU
: Bptdkls2riau

Nomor : UM.006/6/20/BPTD-RIAU/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Mandiri Atas
Implementasi AKIP Tahun 2024 Balai
Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Riau

Pekanbaru, 2 September 2025

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan Evaluasi Mandiri di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap kinerja dan penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa BPTD Kelas II Riau memperoleh nilai **83,76** atau predikat **A**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di BPTD Kelas II Riau sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,7
2.	Pengukuran Kinerja	30	25,5
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,3
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,25
Nilai Hasil Evaluasi			83,76
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. BPTD Kelas II Riau telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang termuat dalam Laporan Hasil Evaluasi tahun 2024 dan menguatkan implementasi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Unit Kerja di BPTD Kelas II Riau telah aktif untuk melakukan perbaikan dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan maupun evaluasi;

3. BPTD Kelas II Riau telah menggunakan aplikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data kinerja;
4. BPTD Kelas II Riau telah mencoba meningkatkan budaya kinerja dengan memberikan penghargaan kepada unit kerja yang telah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dengan patuh;
5. Hal-hal yang masih perlu mendapatkan perhatian guna peningkatan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan pada tahun yang akan datang adalah:
 - a. Terdapat beberapa indikator maupun formulasi indikator masih belum memenuhi kriteria SMART. Kecukupan atas indikator juga harus diperhatikan apakah telah merepresentasikan terwujudnya sasaran, baik di level Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maupun di level unit kerja;
 - b. Pengumpulan dan pengelolaan data kinerja masih belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pengukuran, evaluasi dan perbaikan peningkatan akuntabilitas kinerja. Aplikasi tersebut juga belum memperhatikan keselarasan penjabaran kinerja dari level Bagian ke level unit kerja dibawahnya dan juga ke individu;
 - c. Pada laporan kinerja, analisis atas faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja belum sepenuhnya dijelaskan, dan belum mengaitkan analisa tersebut dengan rekomendasi maupun tindak lanjut atas keefektifan program atau kegiatan dalam upaya mencapai kinerja tersebut;
 - d. Penghargaan yang diberikan atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja masih sebatas pada kepatuhan dan ketaatan dalam pengisian aplikasi, belum sepenuhnya melihat pada kualitas implementasi SAKIP baik dari kualitas perencanaan, pengukuran maupun pelaporan dan evaluasi yang dilakukan;
 - e. Evaluasi telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, namun belum menyeluruh terhadap seluruh satuan kerja yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan uraian di atas dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis serta indikator kinerja dan juga formulasinya, ke satuan kerja dibawahnya, sehingga lebih memenuhi kriteria SMART dan kecukupan atas indikator, serta lebih berorientasi hasil (*result*) dan menunjukkan kinerja yang seharusnya di tiap-tiap level;
2. Mengoptimalkan Pemanfaatan sistem aplikasi yang telah ada sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penggunaan aplikasi ini juga harus terus disempurnakan dengan memperhatikan keselarasan penjenjangan kinerja di tiap-tiap level dan bisa dijadikan sebagai dasar pemberian *rewards* maupun *punishment*;
3. Meningkatkan kualitas pelaporan baik laporan monitoring triwulanan, maupun laporan kinerja tahunan dengan berfokus pada analisis faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan/kegagalan serta sumber daya yang ada terhadap capaian kinerja, sehingga bisa memberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam penentuan strategi dan perbaikan kinerja di periode berikutnya;

4. Meningkatkan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan BPTD Kelas II Riau dalam upaya penyempurnaan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi dan tidak terpisahkan, dan nantinya akan berpengaruh terhadap penyempurnaan implementasi SAKIP di Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat diucapkan terima kasih.

Kepala BPTD Kelas II Riau



Muttaqin, ST, MM.Tr.

NIP. 196912261997031002

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00		26.7	
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	AA	6	
Kriteria:					
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				Dokumen Perencanaan kinerja BPTD Riau mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dan telah menyusun pedoman perencanaan kinerja berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan data dukung berupa: 1. PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kemenhub. 2. PM 112 Tahun 2017 tentang Pedoman Proses Perencanaan di lingkungan kemenhub. 3. PM 80 tahun 2020 tentang Renstra Kemenhub 2020 - 2024. 4. SOP pedoman teknis perencanaan kinerja
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.				Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang yang di buktikan dengan adanya RPJP Kemenhub Tahun 2005 - 2025
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.				Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yang di buktikan dengan data dukung berupa : -Renstra BPTD Tahun 2015-2019 -Renstra BPTD Tahun 2020-2024 -Revisi Renstra BPTD Tahun 2020-2024
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.				Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek yang dibuktikan dengan data dukung berupa : 1. RKT Tahun 2019 - 2024 2. PK Tahun 2019 - 2024
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.				Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dibuktikan dengan adanya data dukung berupa : 1. Renaksi 2019-2024 2. Monitoring Rencana Aksi atas PK 2022-2023
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.				Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja dapat dibuktikan dengan adanya : - Pagu Indikatif; - Pagu Alokasi; - Pagu Anggaran; - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	BB	7.2	

Kriteria:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, dimana hal ini dibuktikan dengan adanya pengesahan : 1.Renstra BPTD 2020-2024 2.SK Manual IKK 2020-2024 3.RKT 2019-2024 4.PK Berjenjang Es III dan IV Tahun 2019-2024 5.RENAKSI 2019-2024
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				1.RENSTRRA telah disahkan di Riau, 31 Des 2019 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 3 Nov 2020 2.LKIP telah disahkan di Riau, 18 Jan 2023 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 24 Jan 2023 3.RKT telah disahkan di Jakarta, 5 Jan 2022 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 21 Feb 2022 4.PK telah disahkan di Jakarta, 5 Jan 2022 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 21 Feb 2022 1.RENSTRRA telah disahkan di Riau, 31 Des 2019 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 17 Feb 2023 2.LKIP telah disahkan di Riau, 17 Jan 2024 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 18 Jan 2024 3.RKT telah disahkan di Riau, 5 Jan 2023 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 18 Jan 2023 4.PK telah disahkan di Jakarta, 5 Jan 2023 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 18 Jan 2023 dibuktikan dengan adanya Lampiran : Bukti Publikasi 1.SS E-Sakip Reviu 2.SS web DITJENHUBDAT
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.				Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai hal ini dibuktikan dengan adanya lampiran : 1.PK 2023 + Revisi 2.RKT 2023 3.REN AKSI REV II 2023 4.LAMPIRAN I RENSTRRA 2020-2024 5.PM 17 Tahun 2022 ttg Ortaker Kementerian sudah ada perbaikan pada PK 2023
4	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.				Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah tergambarkan pada SK IKK BPTD Riau telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, hal ini dibuktikan dengan adanya Lampiran : 1.RKT 2019-2023 2.Renstra 3.(Form 1b_4 dan 6) 4. PK Rev II 2023 5. PM 17 Tahun 2022 ttg Ortaker Kementerian sudah ada perbaikan pada PK 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				Ukuran Keberhasilan Indikator Kinerja, baik metode pencapaian kinerja pada IKK Manual dan LKIP Tahun 2023 telah dijelaskan secara rinci sebagaimana yang tertuang pada dokumen : 1.SK Manual IKK 2020-2024 2 PK 2023 + Revisi
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).				Indikator kinerja utama sudah menggambarkan kondisi Kinerja utama target yang harus dicapai dan sudah tertuang pada : 1.RKT 2.Renstra / Lampiran I Renstra 2020-2024 3.(Form 1b_4 dan 6) 4. SC tabel Capaian Kinerja (LKIP) 5.PK Target
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.				Target pada perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), dengan bukti capaian kinerja LKIP, yang dapat dicapai - Target menantang, dari sisi renstra pada Lampiran Matrik Kinerja - Target menantang karena dalam perjalanan Perjanjian Kinerja, target disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya - Target realistis karena semua target mungkin untuk dapat dicapai Lampiran : 1.Renstra / Lampiran I Renstra 2020-2024 2.PK 2023 3.LKIP 2023
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).				Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan Hubungan yang Selaras dan berkesinambungan dibuktikan dengan Lampiran Cascading pada SK Manual IKP menunjukkan: berkesinambungan jabatan sampai dengan level pelaksana (cascading PK dan dan dibuktikan dengan SKP terbaru yang menunjukkan keselarasan/cascading di setiap level jabatan) Lampiran : Dokumen Cascading 1. PK 2023 2. SKP Staf Seksi yang selaras dengan Es IV 2023 3. Pohon Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).				- Dokumen Renstra, Proses Bisnis memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan, bahkan aktivitas yang menyangkut kerjasama baik dengan unit kerja di internal Kementerian Perhubungan maupun dengan instansi lain diluar kemenhub. - Dokumen LKIP 2023 - BPTD Riau telah melakukan hubungan kinerja dengan instansi eksternal yaitu Melaksanakan Pengujian Berkala alat kalibrasi pengujian Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan Integrasi Sistem dan Penerbitan Bukti Lulus uji dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota SeRiau - BPTD Riau telah melakukan hubungan kinerja dengan stakeholder terkait kegiatan Fisik Rancang Bangun - BPTD Riau telah melakukan hubungan kinerja dengan stakeholder dan mitra kerja terkait kegiatan Pekan Keselamatan Jalan
10	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang tertuang dalam : PK Berjenjang Eselon III sd Eselon IV Tahun 2019 - 2024
11	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				Setiap Pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja melalui penyusunan SKP berdasarkan Perencanaan Kinerja (SKP Minimal 50% Pegawai + Semua Pejabat 2024 Dokumen : SKP 2024
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	A	13.5	
Kriteria:					
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai dengan pembuktian pada: 1. Dokumen DIPA/POK 2024 2. Dokumen Renstra 2020-2024 3. Dokumen PK Pimpinan 2024 4. Dokumen PK Berjenjang 2024 5. Dokumen RKT 2024 6. Manual IKU 7. Rencana Aksi 2024
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, dalam hal ini ditunjukan salah satu contohnya dengan adanya kegiatan Operasional pelabuhan SDP yang mendukung Sasaran Kegiatan IKK 1.6 Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai telah dibuktikan dengan adanya data dukung berupa : 1. Dokumen DIPA/POK 2. Dokumen Renstra / SC Lampiran Renstra I 3. Dokumen PK Pimpinan 2024 4. Dokumen PK Berjenjang 2024 5. Dokumen RKT 2024 6. Rencana Aksi 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .				- Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja telah di capai, sudah tergambarkan pada dokumen LKIP - Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dilakukan monitoring setiap bulan melalui E Performance dengan adanya lampiran bukti : 1. SS E-Performance 2. Dokumen LMCK 3. SS ESR 4. monitoring renaksi 2024 5. PK 2024 6. LKIP 2024
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.				Rencana Aksi berjalan dinamis dengan adanya Revisi I & II Rencana Aksi, dengan kondisi capaian kinerja di pantau berkala, Pemantauan capaian kinerja bulanan dengan aplikasi e-Performance dan Pemantauan capaian kinerja triwulanan dengan Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) dengan adanya lampiran bukti : 1. SS E-Performance, 2. Dokumen LMCK I - III 2024 (laporan monitoring capaian kinerja) merupakan bukti capaian kinerja di pantau secara berkala 3. SS ESR 4. RENAksi REV II 2024 5. LKIP 2024 6. Monitoring Rencana Aksi 2024
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.				"Terdapat upaya perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dengan uraian sebagai berikut: - untuk Renstra dengan Evaluasi Paruh Waktu (EPW) Renstra - untuk Perjanjian Kinerja terdapat Revisi I & II PK dengan perbaikan/penyempurnaan karena Anggaran maupun Perubahan Pimpinan - untuk Perjanjian Kinerja terdapat perbaikan target dengan hasil analisis : menyesuaikan realisasi tahun sebelumnya - untuk Rencana Aksi terdapat perbaikan RenAksi menyesuaikan perbaikan/Revisi PK - untuk LKIP terdapat upaya perbaikan pada setiap narasi per Indikator Kinerja Program (Bab 3) dan rencana tindak lanjut (Bab 4.b) 1. Dokumen LMCK 2024 2. LKIP 2024 3. Dokumen PK dan Revisi Pimpinan 2024 4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.				Terdapat upaya perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dengan uraian sebagai berikut: - untuk Renstra dengan perbaikan lampiran matriks - untuk Perjanjian Kinerja terdapat Revisi I & II PK dengan perbaikan/penyempurnaan karena Anggaran maupun Perubahan Pimpinan - untuk Rencana Aksi terdapat perbaikan RenAksi menyesuaikan perbaikan/Revisi PK - untuk LKIP terdapat upaya perbaikan pada setiap narasi per Indikator Kinerja Program (Bab 3) pada tahun 2024 dengan adanya lampiran bukti : 1. Dokumen LKIP 2024 2. Dokumen PK Pimpinan dan Berjenjang + Revisi 2024 3. Pada tahun 2024 menindaklanjuti dari hasil evaluasi sakip internal telah dilakukan penyempurnaan internal revisi PK 4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2024
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				telah memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, dimana hal ini dibuktikan dengan: - Komitmen pimpinan di buktikan secara formal dengan pengesahan tanda tangan pada setiap Dokumen Perjanjian Kinerja diperjanjikan setiap awal tahun untuk mencapai kinerja; - Komitmen aktivitas dituangkan dalam Dokumen Rencana Aksi - Komitmen pemantauan mencapai kinerja yang ditunjukkan dengan menggunakan Aplikasi E-Performance - Komitmen capaian kinerja dituangkan secara Triwulan dalam LMCK dan pada akhir tahun anggaran dalam LKIP Data dukung berupa: 1. Screenshoot e-Performance; 2. Screenshoot e-SAKIP Reviu; 3. Dokumen PK Berjenjang 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				"Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penyampaian kuisioner ke sampling pegawai (20 orang) pegawai dimana para pegawai diiminta untuk mengisi kuisioner terkait pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja pegawai. Hasil dari kuisioner tersebut disampaikan secara berjenjang dari Kasubbag Tata Usaha kepada Kepala Balai dengan hasil Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dengan rincian: Yang memahami 55% Yang peduli 45% Yang Berkomitmen 47,4% lampiran : - SKP minimal 50% Pegawai + semua Pejabat tahun 2024 - Nodin penyampaian hasil survey
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00		25.5	
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	A	5.4	
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				Telah terdapat pedoman Teknis dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja pada BPTD Riau, sebagai lampiran: 1.PM 85 Tahun 2020 2.PM 11 Tahun 2013 tentang pengumpulan data kinerja dilingkungan kemenhub 3.PM 12 Tahun 2013 ttg pedoman pengukuran indikator kinerja dilingkungan kemenhub 4. IKK Manual yang disahkan oleh Kabalai benbentuk SK (SK Manual IKK) 5. SOP Pengumpulan Data Kinerja 6.Laporan Implementasi Sakip (Acara Sakip)
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.				Definisi Operasional telah terukur melalui indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional melalui kegiatan subsidi keperintisan angkutan jalan di Prov Riau dimana indikator pencapaian diukur berdasarkan jumlah realisasi ritase dibandingkan dengan jumlah target ritase 1. IKK Manual Tahun 2024 (IKK 1.1) 2. LKIP Tahun 2024 (Bab III IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional adalah Perbandingan antara Jumlah Pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan Jumlah Pelayanan yang direncanakan) 1. PM 85 TAHUN 2020 2. SK MANUAL IKK + Meta Indikator 2015-2019, 2020-2024 3. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA 4. LAPORAN ACARA SAKIP 5. LKIP 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				Mekanisme Pengumpulan data kinerja telah tergambarkan pada : 1. PM 85 Tahun 2020 2. PM 11 Tahun 2013 tentang pengumpulan data kinerja dilingkungan kemenhub 3. PM 12 Tahun 2013 ttg pedoman pengukuran indikator kinerja dilingkungan kemenhub 4. IKK Manual yang disahkan oleh Kabalai berbentuk SK (SK Manual IKK) 5. SOP Pengumpulan Data Kinerja 6. Laporan Implementasi Sakip (Acara Sakip) 7. Dokumen Cascading 8. cara pengumpulan data = aplikasi eperformance
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	A	8.1	
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.				Pimpinan sudah terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja seperti paraf berjenjang pada LKIP dan LMCK dan pada akun pimpinan di e performance yang dbuktikan pada Rapat evaluasi SAKIP 2024, dibuktikan dengan adanya Lampiran : 1. paraf relase LKIP dan LMCK 2. SS akun E - Performance Pimpinan 3. Notulen rapat internal
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.				Data kinerja dalam SK IKK BPTD Riau telah mendukung dalam mengukur capaian kinerja yang di harapkan, hal ini telah dituangkan dalam dokumen LKIP juga dengan adanya bukti lampiran : 1. PK 2. Renaksi 3. LMCK 4. LKIP 5. SC EPERFORMANCE 6. IKU
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.				Data kinerja dalam SK IKK BPTD Riau telah mendukung dalam mengukur capaian kinerja yang di harapkan, hal ini telah dituangkan dalam dokumen : 1. LMCK 2. LKIP 3. SS EPERFORMANCE 2024 4. SK Manual IKK
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.				Telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala yang dibuktikan pada pengisian e performance yang telah diupload di ESR Lampiran : 1. SS Eperformance 2. LMCK I-III 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.				PK diturunkan secara berjenjang mulai dari PK Kabalai dirurunkan ke struktural dan sampai level individu. hal ini selalu terpantau dan dapat dibuktikan dengan laporan bulanan individu yang selalu dinilai oleh atasan langsungnya, selain itu dilakukan juga monitoring renaksi secara berkala dan dilengkapi paraf relase dari para kasi lampiran : 1. SS e performance, sc ESR 2. SKP minimal 50% Pegawai + semua Pejabat tahun 2024 + Capaian kinerja kasi (IKK Eselon IV & Es III) + Lapbul (contoh salah satu kasi+staf) 3. Monitoring Rencana Aksi 2024
6	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Pengumpulan data telah memanfaatkan teknologi informasi meliputi : e-performance, aplikasi ESR, E Monev bappenas, E Monitoring Lampiran : SS e performance SS ESR SS E Monev Bappenas SS E Monitoring SS website BPTD
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).				Pengumpulan data telah memanfaatkan teknologi informasi meliputi : e-performance, aplikasi ESR, E Monev bappenas, E Monitoring Lampiran : SS e performance SS ESR SS E Monev Bappenas SS E Monitoring SS website BPTD
2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam		15.00	BB	12	
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.				PK diturunkan secara berjenjang mulai dari PK Kabalai dirurunkan ke struktural dan sampai level individu. hal ini selalu terpantau dan dapat dibuktikan dengan laporan bulanan individu yang selalu dinilai oleh atasan langsungnya, penilaian ini merupakan pengukuran kinerja individu oleh atasannya sebagai dasar perhitungan tunjkin yang berhak diterima oleh pegawai. pada 2024, terdapat pegawai yang tidak masuk kerja dikarenakan sakit (stroke) sehingga diberikan pengurangan pembayaran berupa 75% terhadap yg bersangkutan Lampiran : 1. Lapbul 2. Laporan pembayaran tunjangan kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.				Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional. Hal ini dibuktikan dengan : 1. Perubahan BPTD dari Wilayah menjadi Kelas II dengan Struktural berubah (ada kajian tidak) cc SDM 2. naskah akademis perubahan BPTD dilampirkan Perihal Penghapusan Jabatan, bukan ke orangnya tetapi nomenklatur jabatan Lampiran : - Naskah akademis - Lapbul - Surat usulan assesment/diklat dari UPT dan DP3 sesuai usulan assesment
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.				Pengukuran Kinerja Telah mempengaruhi penyesuaian organisasi dibuktikan dengan adanya: 1. Realokasi Anggaran 2. Surat Usulan Anggaran 3. Monitoring Rencana Aksi Januari-Desember Tahun 2024 Data dukung : - Naskah Akademis - PM ortaker
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.				E-Performance telah dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja ddibuktikan dengan adanya lampiran berupa: 1. Revisi PK 2024 2. SS E performance 2024 3. LMCK 2024 4. Renaksi 5. Monitoring rencana Aksi 2024
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.				E-Performance telah dimanfaatkan dalam penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja dibuktikan dengan adanya lampiran berupa : 1.Revisi Renaksi 2024 2.Revisi PK 2024 3.Notulen Rapat Kegiatan 4.- Nota Dinas Sosialisasi SKP dan DP3 - Nota Dinas Absensi Biometrik - Nota Dinas Gotong Royong - Nota Dinas Permintaan Informasi Terkait Peraturan sesuai Tupoksi - Nota Dinas Sosialisasi Administrasi Perkantoran dan Kearsipan - Nota Dinas Himbauan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 5. Monitoring Rencana Aksi 2024 + Adjustment Evaluator

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.				Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja yang tertuang pada LMCK dan dibuktikan dengan adanya lampiran berupa : 1.LMCK 2024 2.LKIP 2024, 3.Renaksi 4. - Nota Dinas Sosialisasi SKP dan DP3 - Nota Dinas Absensi Biometrik - Nota Dinas Gotong Royong - Nota Dinas Permintaan Informasi Terkait Peraturan sesuai Tupoksi - Nota Dinas Sosialisasi Administrasi Perkantoran dan Kearsipan - Nota Dinas Himbauan Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 5. Monitoring Rencana Aksi 2024 + Adjustment Evaluator
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.				Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja yang dibuktikan pada lampiran berupa : 1. Usulan Revisi Anggaran Satker BPTD kelas II 2.LMCK 3.PK 4. Monitoring Renaksi yg menggambarkan terjadinya perubahan Anggaran + Adjustment Evaluator
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.				Terdapat penghematan anggaran dalam pencapaian tujuan kinerja tertuang BAB III LKIP bagian Realisasi Anggaran (Bag. Efisiensi) Surat revisi DIPA
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				BPTD Riau telah memahami dan peduli atas pengukuran kinerja yang dibuktikan dengan pengisian kuisioner berbentuk google form yang diisi oleh pegawai BPTD Riau lampiran : 1. SS E-performance 2024 2. LKIP 2024 3. LMCK 2024 4. PK 2024 5. Nodin penyampaian Hasil Kuisioner
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.				Setiap pegawai BPTD Riau memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yang dibuktikan dengan masing-masing pegawai membuat SKP dan mengisi kuisioner Pengukuran Kinerja Pegawai BPTD Riau Lampiran : 1.SKP 2024 2. Nodin penyampaian Hasil Kuisioner
3	PELAPORAN KINERJA	15.00		12.3	
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan	3.00	A	2.7	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.				Dokumen Laporan Kinerja telah disusun dibuktikan dengan adanya LMCK 2024 dan LKIP 2019-2024
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.				Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala yang mana disusun pertriwulan dibuktikan dengan LMCK I 2021,LMCK I-III 2022, LMCK I-III 2024 dan laporan kinerja yang disusun setiap tahun dibuktikan dengan LKIP 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.				Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan dibuktikan dengan : 1.LMCK tw I 2022 telah di tandatangani kabalai pada tanggal 5 april 2022 di halaman 8 pada LMCK 2.LMCK tw II 2022 telah di tandatangani kabalai pada tanggal 7 juli 2022 di halaman 8 pada LMCK 3.LMCK tw III 2022 telah di tandatangani kabalai pada tanggal 7 oktober 2022 di halaman 8 pada LMCK 4.LKIP 2022 telah di tandatangani kabalai pada tanggal 18 januari 2024 di halaman 4 pada LKIP 5.LMCK tw I 2024 telah di tandatangani kabalai pada tanggal 5 april 2024 di halaman 9 pada LMCK 6.LMCK tw II 2024 telah di tandatangani kabalai pada tanggal 20 juli 2024 di halaman 8 pada LMCK 7.LMCK tw III 2024 telah di tandatangani kabalai pada tanggal 20 oktober 2024 di halaman 5 pada LMCK 8.LKIP 2024 telah di tandatangani kabalai pada tanggal 17 januari 2024 di halaman 4 pada LKIP
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.				Dokumen Laporan Kinerja telah direviu dibuktikan dengan adanya : 1.Paraf Relas LMCK halaman 8 dan LKIP 2019 - 2024 halaman 4 2.Bukti reviu catatan 2021-2024
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.				SS E- Sakip Reviu Menpan website DJPD
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.				1.RENSTRa telah disahkan di Riau, 31 Des 2019 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 3 Nov 2020 2.LKIP telah disahkan di Riau, 18 Jan 2024 telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 24 Jan 2024 3.PK telah disahkan di Jakarta, 5 Jan 2022 telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 21 Feb 2022 1.REVISI RENSTRa telah disahkan di Riau, 30 Des 2024 dan telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 12 Jan 2024 2.LKIP telah disahkan di Riau, 17 Jan 2024 telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 18 Jan 2024 3.PK telah disahkan di Riau, 9 Jan 2024 telah dipublikasi ke website/ESR pada tanggal 20 Jan 2024 Lampiran : Bukti Publikasi SC Renstra,LKIP, pada aplikasi ESR Menpan SC LKIP, PK pada aplikasi DITJENHUBDAT
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	BB	3.6	

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.				format LKIP sesuai standart, memuat batang tubuh sesuai format pm 85/2020 Lampiran : 1.LKIP 2024 2.LMCK 2024
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.				Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dibuktikan dengan adanya penjelasan dan metode pencapaian kinerja secara detail dengan data dukung berupa : 1.PM 85 Lampiran 2.LKIP 2024 3.LMCK 2024
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.				1.PM 85 Lampiran 2.LKIP 3. LMCK 2024 4. LKIP 2024
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.				LKIP Bab III 2024
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.				LKIP Bab III + paragraf penjelasan + SC terkait Bab III a.5 perbandingan realisasi
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).				Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (Benchmark Kinerja) yg tertuang pada Bab III poin a7 dan sebagai tambahan data dukung telah dilampirkan dokumen sebagai berikut : LKIP 2024
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.				LKIP 2024
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.				1.LKIP BAB III 2024 2.SK pengelola anggaran 3. SS Tabel efisiensi anggaran
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).				LKIP BAB IV Bagian B 2024 + langkah2 kedepan SC tabel tindak lanjut 4.2 hal 151
3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang		7.50	BB	6	
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).				1. LKIP dengan paraf 2024 2. Berita Acara wawancara (termasuk dakung, dokumentasi, dll) + capaian kinerja pada rapat 3. Nota Dinas ttg Laporan Kinerja yang disampaikan kepada pimpinan kemudian pimpinan memberi arahan berupa disposisi / Notulen Rapat terkait kinerja unit kerja
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.				1. Nodin Penyampaian LKIP Kepada seluruh pegawai BPTD Kelas II Riau 2. upload nodin dari es 4 ke pegawai masing2 terkait penyebaran nodin Kabalai 3. SKP
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.				LKIP Bab III 2024 LMCK I,II,III Renaksi Monitoring rencana aksi 2024 SC bag penutup tindak lanjut

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.				Dokumen LMCK telah memuat analisis realisasi anggaran sebagai justifikasi penyesuaian penggunaan anggaran Lampiran : LMCK LKIP POK + revisi Revisi RPD / Dokumen Rev PK Monitoring Renaksi yg menggambarkan terjadinya perubahan Anggaran
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.				Dokumen LKIP telah memuat evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja BAB 4 bagian B Lampiran : LKIP Revisi RPD Dokumen PK Rev II Risalah /Notulensi Rapat
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.				Dokumen LKIP telah digunakan dalam penyesuaian Perjanjian Kinerja Lampiran : LKIP 2024 Revisi RPD PK 2024
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.				terdapat hal yang dapat mempengaruhi budaya kinerja organisasi dalam ketepatan administrasi misalnya dalam penggunaan ESR dapat dibandingkan antara tahun 2019-2024
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00		19.25	
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah	5.00	A	4.5	
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.				Telah terdapat pedoman Evaluasi kinerja pada BPTD Riau, sebagai lampiran: 1.PM 85 tahun 2020 2. Permenpan 88 Tahun 2021 3. SE Iirjen Kemenhub Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 203 ttg Petunjuk pelaksanaan evaluasi dan implementasi SAKIP unit kerja eselon I Kemenhub tahun 2022
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Evaluasi AKIP secara mandiri telah dilaksanakan dan berdasarkan format permenpan 88 tahun 2021 dimana didalamnya terdapat penilaian terhadap IKK yg dilaksanakan oleh semua unit kerja/seksi dilingkungan BPTD Riau sehingga evaluasi ini melibatkan peran serta dari seluruh unit kerja. hal ini ditunjukkan padatelah dilaksanakan dan melibatkan Eselon III dan Eselon IV dibawahnya, hal ini ditunjukkan dengan: 1. Laporan Kegiatan Sosialisasi Evaluasi, Undangan Kegiatan, Dokumentasi Rapat Kegiatan. 2. Surat dari Kepala BPTD kepada Sesditjen Hubdat perihal Penyampaian LKE Mandiri (dengan Lampiran LKE); 3.Hasil evaluasi mandiri oleh masing-masing unit kerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.				Telah mengikuti Simulasi Evaluasi Mandiri Bersama Sesditjen dan Itjen, juga telah melaksanakan evaluasi mandiri internal hal ini dibuktikan dengan adanya data dukung sebagai berikut : 1.Laporan kegiatan Sosialisasi Evaluasi 2.Undangan Kegiatan 3.Dokumentasi rapat kegiatan 4.Surat dari Kabalai kepada Pak Sesditjen perihal penyampaian hasil LKE Mandiri (dgn lampiran kertas kerja) Evaluasi yang dilakukan eselon I terhadap hasil evaluasi mandiri yang telah dilakukan oleh Unit Kerja
4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah		7.50	BB	6	
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.				LKE - Permenpan 88 Tahun 2021 - PM85 Tahun 2020 - SE Iirjen Kemenhub Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2023 ttg Petunjuk pelaksanaan evaluasi dan implementasi SAKIP unit kerja eselon I Kemenhub tahun 2022
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.				SK Tim Evaluasi, SDM yang mempunyai kompetensi Manajemen Lampiran: Data Dukung Sertifikat SK/ST dan Sertifikat Bimtek Evaluasi SAKIP
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.				Evaluasi AKIP telah dilaksanakan melalui pendalaman yang memadai dan dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang telah memiliki Sertifikasi dan telah mengikuti Diklat / Bimtek AKIP serta dilaksanakan sesuai dengan LKE Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021. dibuktikan dengan adanya lampiran: 1. LKE; 2. Permenpan RB 88 Tahun 2021 3. Hasil evaluasi mandiri oleh Unit Kerja 4. Surat Tindak lanjut Hasil Evaluasi Mandiri SAKIP dari Kepala BPTD kepada Sesditjen Hubdat
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.				Evaluasi AKIP telah dilaksanakan sampai level Es II & Balai, Individu (dalam laporan bulanan) lampiran: Surat penyampaian LHE Hasil evaluasi mandiri oleh Unit Kerja
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).				SS ESR, dan SS zoom SAKIP, Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memanfaatkan aplikasi e performance dengan mengisi capaian kinerja setiap bulan telah diupload ke ESR Penggunaan Teknologi Informasi menggunakan program komputer (minimal excel)
4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi		12.50	B	8.75	
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.				Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada BPTD Riau telah ditindaklanjuti yang dibuktikan dengan adanya : 1. Surat Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Mandiri 2. surat hasil TL Evaluasi Mandiri SAKIP sesuai dengan rekomendasi pada laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit/Satker		Catatan (Penjelasan)
			Jawaban	Nilai	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal.				BPTD Riau telah melakukan peningkatan implementasi SAKIP dengan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal yg dibuktikan dengan adanya : surat hasil TL Evaluasi Mandiri Internal 2024
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.				BPTD Riau telah melakukan perbaikan dan peningkatan implementasi pada Evaluasi Mandiri, dibuktikan dengan adanya : 1. Surat Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Mandiri 2. surat hasil TL Evaluasi Mandiri SAKIP sesuai dengan rekomendasi pada laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 3. PK 2024 4. LKIP 2024
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.				BPTD Riau telah mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dalam pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP dibuktikan dengan adanya : 1. Surat Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Mandiri 2. surat hasil TL Evaluasi Mandiri SAKIP sesuai dengan rekomendasi pada laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 3. PK 2023 4. LKIP 2023
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.				BPTD Riau telah mengupayakan peningkatan perbaikan dan peningkatan kinerja dan telah dilampirkan surat hasil TL Evaluasi Mandiri SAKIP sesuai dengan rekomendasi pada laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 dibuktikan dengan adanya: 1. Surat Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Mandiri 2. surat hasil TL Evaluasi Mandiri SAKIP sesuai dengan rekomendasi pada laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 3. PK 2024 4. LKIP 2024